

Analisis Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MAN 2 Kabupaten Bima

Suraya¹, Kasman² ✉

^{1,2} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Mbojo Bima

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima sudah berjalan dengan baik, dengan beberapa indikator. Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima tak luput dari beberapa perannya tersebut, yang pertama pertimbangan (*advisory agency*), yang kedua sebagai pendukung (*supporting agency*), yang ketiga sebagai pengontrol (*controlling agency*), dan yang keempat sebagai mediator (*executive*). Kesimpulannya bahwa komite sekolah sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima karena komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*), dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah, komite sekolah. Mendukung (*supporting agency*) penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Melakukan Kontrol (*controlling agency*) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, dan Menjadi Mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua masyarakat terhadap pihak sekolah dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang di tingkat daerah.

Kata Kunci: *Analisis, mutu, pendidikan*

Copyright (c) 2022 Suraya

✉ Corresponding author :

Email Address : surayabima222@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan dan sekaligus merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan nasional oleh karena itu pendidikan memiliki posisi strategis dalam berbagai aspek pembangunan bangsa khususnya dalam upaya pengembangan sumber daya manusia.

Pengembangan sumber daya manusia yaitu melalui proses pelatihan dan pengajaran, terutama di peruntukkan kepada anak-anak dan remaja, baik di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus, dengan tujuan memberikan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pendidikan juga adalah proses pemertabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memandu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan. Pendidikan adalah metamorfosis perilaku menuju kedewasaan sejati.

Pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai proses elevasi yang dilakukan secara nondiskriminasi, dinamis, dan intensif.

Menurut John Dewey, pendidikan adalah sebuah kebutuhan hidup dan fungsi sosial, yang bertumpuk pada masing-masing individu juga golongan/masyarakat, dengan kemungkinan mengalami kemajuan yang bias diukur dengan kriteria-kriteria tertentu, secara demokratis bisa dinilai dari kualitas masyarakat yang ada.

Menurut Muhammad Athiyah Al-Abrasyi memberikan pengertian bahwa pendidikan islam (Al-Tarbiyah Al-Islamiyah) mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan berbahagia, mencitai tanah air, tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tuturkatanya baik dengan lisan dan tulisan⁴

Dengan memperhatikan beberapa defrinisi di Atas maka berarti pendidikan islam adalah suatu proses edukatif yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian. Pendidikan agama islam di Indonesia mendapatkan tempat yang layak serta perhatian yang serius dari masyarakat dan pemerintah mulai sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Dan pendidikan agama merupakan matapelajaran yang paling penting atau pokok di sekolah. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan pendidikan agama islam di sekolah dan di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yakin manusia yang beriman danbertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri dan bertanggung jawab kemasyarakat dan kebangsaan.

Dari tujuan pendidikan nasional diatas, ditegaskan bahwa salah satu ciri manusia Indnesia yang menjadi tujuan pendidikan nasional ialah manusia yang beriman dan bertakwa. Agar beriman dan bertakwa ini dapat terwujud, mutlak diperlakukan adanya pendidikan keimanan dan ketakwaan. Dan itulah pendidikan agama.

Tujuan pendidikan nasional tersebut, menempati hirerarki tertinggi jika dilihatdari taksonomi tujuan pendidikan. Ibarat sebuah pohon dimana tujuan pendidikanasional sebagai batangnya, sedangkan tujuan kelembagaan (institusional) dan tujuan pengajaran (kurikuler) adalah sebagai cabang dan rantingnya.

Pada dasarnya pendidikan adalah upaya untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu hidup dengan baik. Sebuah upaya untuk meingkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan islam di Indonesia tidak pernah berhenti dan selesai. Berbagai konsep dan wawasan baru itu diharapkan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia agar mampu bersaing secara global. Dengan demikian persoalan peningkatan mutu pendidikan sangat perlu dikaji dan diperjuangkan.

Untuk merealisasikan perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan makaperlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusianya, lembaga peyelenggara pendidikannya seperti MI, MTS, MA dan perguruan tinggi dan semuanya itu perlu didukung oleh sumber daya pendidikan yang layak. Sumber daya pendidikan itu antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana serta dana yang diadakan dan di dayagunakan oleh pemerintahan, masyarakat, keluarga, peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam membentuk kerjasama.

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomondasi seluruh keinginan sekaligus memperdayakan berbagai komponen masyarakat secara efektif, guna mendukung kemajuan dan sistem yang ada di sekolah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendidikan yang ditawarkan.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi kegiatan masyarakat dan pemerintahan.⁷ Dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peran peserta dan dukungan masyarakat, baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan. Untuk menampung peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan, maka dibentuklah komite sekolah.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam satuan pendidikan, maka wadah yang tepat dalam memberikan dukungan dan partisipasi masyarakat, serta lembaga yang lebih baik adalah komite sekolah.

Komite sekolah sangat memegang peranan penting bagi penyelenggaraan pendidikan bermutu dengan adanya pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan yang bermutu, pendukung, pengontrol dan mediator. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*). Selain itu, data yang terkumpul lebih bersifat kualitatif.

Teknik analisis data dapat dilakukan setelah data-data telah terkumpul melalui teknik analisis data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Saya sebagai penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan beberapa langkah diantaranya penyajian data, menganalisis data dan menyimpulkan data. Dimana teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan di verifikasi.¹⁰ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada bagian ini, peneliti memilih dan memilih data hasil wawancara dengan beberapa guru di MAN 2 Kabupaten Bima sehingga peneliti bisa mendapatkan hasil kesimpulan akhir. *Kedua*, Data Display (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Bentuk display data dalam penelitian kualitatif yang paling sering yaitu teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi dimasa lampau.¹¹ Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Pada bagian ini, peneliti menyajikan data dari hasil reduksi data dengan bentuk uraian singkat. Uraian singkat peneliti dapatkan setelah melakukan wawancara dengan kepala sekolah, wakil guru dan pengurus komite di MAN 2 kabupaten Bima. *Ketiga*, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan (*verifikasi*).

Penarikan kesimpulan (*verifikasi*), yaitu makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yaitu berupa validasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan komite sekolah di MAN 2 Kabupaten Bima memberikan nuansa positif dalam penyelenggaraan pendidikan di era otonomi pendidikan, karena komite sekolah merupakan wadah yang bisa menampung aspirasi masyarakat dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang bermutu dengan menjalankan peran dengan baik. Adapun peranan Komite sekolah sebagai berikut:

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan.
2. Pemberi dukungan (*supporting agency*) baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintahan (*executive*) dengan masyarakat disatuan pendidikan.¹³

Secara formal, hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah. Kehadiran komite sekolah telah menunjukkan sahamnya sebagai mitra sekolah terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non fisik. Sesuai dengan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*)

Komite sekolah sebagai badan pemberi pertimbangan terhadap sekolah memiliki arti, bahwa komite sekolah dipandang mitra kerja kepala sekolah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan sekolah. Melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat dapat ikut serta, merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh sekolah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Selama ini keberadaan komite sekolah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan. Karena komite sekolah merupakan pembantu utama satuan dalam memakmurkan lembaga pendidikan selain masyarakat internal sekolah.

Dalam menjalankan perannya ketua Komite sekolah memberi pertimbangan dalam rancangan anggaran belanja sekolah (RAPBS), kriteria tenaga kependidikan, pengadaan peralatan laboratorium, pengrehapan ruang kelas, rencana pembangunan ruang kelas, sebelum sekolah mengambil keputusan maka terjadilah diskusi antara kepala komite sekolah dan pihak sekolah.

Sehingga kehadiran Komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dapat memberikan pertimbangannya dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya sekolah akan mengajukan rehab sarana prasarana dan gedung yang rusak, sekolah. Maka pihak sekolah terlebih dahulu mengkonsultasikan masalah itu kepada komite sekolah agar dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah dan atas nama masyarakat yang diwakilinya, komite sekolah dapat menyatakan "setuju" atau "tidak setuju" terhadap rencana program pendidikan yang disusun oleh sekolah.

Selain daripada itu, posisi komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan masih berlanjut pada pemberian masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non fisik. Sesuai dengan perannya dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Kemudian dalam pelaksanaan program, yang menyangkut: kurikulum, silabus, PBM (Proses Belajar Mengajar), dan penilaian komite MAN 2 Kabupaten Bima sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk pembelajarannya. Sehingga dalam meningkatkan mutu pendidikan komite sekolah ikut serta dalam keterlibatannya untuk menerapkan RAPBS dalam pengelolaan SDM, sarana prasarana, dan alokasi anggaran sekolah di MAN 2 Kabupaten Bima.

Sebagai pendukung (*supporting agency*)

Peran komite sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secaranyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan mencari solusi berbagai masalah yang terjadi di sekolah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. Pemberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperpersoalkan yang ada di sekolah masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan dewan pendidik.

Peran pendukung yang dipegang oleh komite sekolah tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari itu. Dengan berperan sebagai *supporting agency* ini, Komite sekolah dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Karena pendidikan khususnya lembaga (satuan) pendidikan tidak dapat berperan sebagai mana fungsinya sebagai lembaga pembentuk generasi beradab dan berpengetahuan tanpa mendapat dukungan besar dari masyarakat luas.

Pada dasarnya pendidikan yang baik membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, ruangan kelas yang cukup, serta biaya yang banyak. Akan tetapi selama ini anggaran yang terdapat di sekolah sangat terbatas, oleh karenanya dalam hal ini masyarakat diharapkan menjadi penanggung jawab dan donatur yang memberikan dana demikelaan kegiatan pendidikan di sekolah. Masyarakat yang berminat dan bersimpati dapat memberikan bantuannya melalui berbagai cara, misalnya: membantu penyediaan alat peraga, buku-buku, serta memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu.

Komite sekolah sangat membantu kemandirian sekolah dalam hal anggaran, fasilitas sekolah yang masih kurang, mencari dana untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa memberatkan orang tua siswa. Selain fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan.

Pendanaan yang didapatkan oleh komite sekolah dari hasil iuran orang tua siswa setiap bulannya. Salah satu anggaran dana yang dapat dari iuran orang tua siswa, untuk membayar transportasi guru honorer. Komite sekolah juga membantu dalam hal sarana prasarana di MAN 2 Kabupaten Bima. Dan tetapi tidak hanya memberikan dukungan dan pengadaan sarana prasarana fisik saja, namun termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Kemudian komite juga dalam menjalankan perannya pada aspek pendukung dimana komite sekolah juga membantu mengembangkan sumber daya manusianya, yakni dengan memberikan sumbangan saran dan motivasi agar para guru semakin tiasa dapat meningkatkan kinerjanya sehingga sekolah bisa menjadi lebih maju dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain.

Sebagai pengontrol (*controlling agency*)

Komite dalam menjalankan Perannya pada aspek pengontrol adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di sekolah. Pengawasan yang dilakukan oleh komite sekolah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping

alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksana program disekolah. Komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap sekolah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.

Komite sekolah, mengontrol pengeluaran keuangan sekolah sekaligus transparansi penggunaan alokasi dana agar lebih dapat mempertanggung jawabkan. Selain itu juga mengontrol proses jalannya belajar- mengajar peserta didik di MAN 2 Kabupaten Bima. Bahwa peran dalam *controlling agency* komite sekolah tidak hanya terbatas pada finansial saja melainkan dalam urusan pengambilan keputusan dan pengembangan fasilitas. Komite sekolah peranya dalam pengontrol yaitu melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan di sekolah dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan program sekolah, maupun dalam pengembangan dan penambahan fasilitas sekolah, misalnya: buku-buku yang ada di perpustakaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan."

Peran dalam controlling ini juga dimaksudkan agar komite sekolah sebagai mitra sekolah dan masyarakat memberikan informasi yang akurat yang memuaskan, terlebih yang berhubungan dengan input dan output yang dihasilkan sekolah harus dapat diterima oleh masyarakat

Sebagai Mediator

Komite sekolah sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite sekolah untuk disampaikan kepada sekolah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat. Aspirasi yang disalurkan melalui komite sekolah dimanfaatkan oleh sekolah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite sekolah juga berperan dalam mengsosialisasikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah sehingga dapat akuntabel (dipertanggungjawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite sekolah peran yang halus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orangtua siswa bagi pelaksanaan pendidikansekolah.

Dalam operasionalnya, komite sekolah sebagai mediator ini lebih banyak untuk ditujukan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untuk dilakukan sebab sekolah adalah sebuah sistem yang berada di tengah-tengah masyarakat, hidup dan mati lembaga pendidikan tergantung dari peran serta masyarakat.

Begitu juga halnya, dalam setiap menjalankan programnya sekolahmaupun komite sekolah senantiasa meminta bantuan kepada masyarakat, sebagaimana yang diutarakan oleh Bapak Habson selaku ketua komite sekolah yang menjelaskan terjalinnya hubungan yang harmonis antara pihak sekolah dengan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan. Selain dalam hal pengembangan fisik, komite sekolah berkerjasama dengan pihak sekolah dan masyarakat mengadakan kegiatan ke islaman, contohnya pada hari jumat pagi sebelumproses belajar mengajar di ajakan muhadoroh , dan ketika solat jumat yang laki-laki harus berjamaah solah di sekolah, agar anak-anak tersebut menjadi lebih baik dan berakhlak, ini juga tidak luput dari dukungan masyarakat luas khususnya para orang tua.

Komite sekolah juga berperan menyerap dan menganalisis aspirasi ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat, baik masyarakat internal sekolah maupun eksternal sekolah. Bagi masyarakat internal sekolah (guru, karyawan, dan siswa) keberadaan komite sekolah dengan peran dan fungsinya sebagai mediator ini memberikan support bagi masyarakat internal sekolah itu sendiri, apalagi komite sekolah

siap menampung segala keluhan kesah yang dicurahkan untuk dibicarakan bersama jajaran pimpinan sekolah.

Komite sekolah di MAN 2 Kabupaten Bima ini menjadi mediator bagi sekolah untuk mempromosikan sekolah kepada masyarakat terkait dengan keunggulan yang dimiliki dan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kebutuhan sekolah sehingga pihak sekolah juga selalu mendapatkan support dari komite sekolah agar terus dapat meningkatkan mutu pendidikan."

Kemudian dalam menjalankan perannya pada aspek mediator komite sekolah mendengar dan menampung aspirasi ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat terkait dengan pengelolaan pendidikan di sekolah dan menyampaikan kepada masyarakat kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah sehingga masyarakat maupun pemerintah bisa berpartisipasi. Sesuai dengan perannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite sekolah berusaha untuk memberikan pengarahan dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan hal ini berujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pemerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

SIMPULAN

Komite sekolah sangatlah berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima karena komite sekolah memiliki beberapa peranan yang harus dijalankan untuk sekolah itu. Kesimpulan yang dapat di ambil dari peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima dibutuhkan Peran komite sekolah terhadap peningkatan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima, sebagai berikut:

- a. Memberikan pertimbangan (*advisory agency*), dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya penyusunan dan penetapan RAPBS, perbaikan dan pengadaan sarana prasarana, seperti perbaikan rang kelas, pengadaan alat peraga, pembangunan laboratorium, pembangunan ruang kelas., memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dapat diperbantukan bagi pengembangan sekolah.
- b. Mendukung (*supporting agency*) penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan di MAN 2 Kabupaten Bima berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran.
- c. Melakukan Kontrol (*controlling agency*) terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber daya bagi pelaksanaan program di sekolah komite sekolah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah yang dilihat dari mutu pendidikan.
- d. Menjadi Mediator atau penghubung antara masyarakat dengan pihak sekolah maupun dengan pemerintah terkait dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah dan turut serta memasyarakatkan kebijakan sekolah kepada pihak-pihak yang terkait dan berwenang.

Referensi :

- Danim Sudarwan, 2010, *pengantar pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Departemen Agama RI. 2003, *Pedoman komite sekolah* (Direktorat jendralkelembagaan Agama Islam).
- E.Mulyasa, 2006, *manajemen berbasis sekolah*, Bandung PT. Remaja Rosada Karya.
- Habson, Kepala Komite MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 15 Oktober 2018.
- Kepmendiknas, 2003, SK No. 004/U/2002, *tentang acuan pembentukan komitesekolah* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Nurbani, 2018, Kepala TU MAN 1 Palembang, *wawancara*, 11 oktober.
- Rahmayulis, 1995, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta Pusat: Kalam Mulia.
- Sri Rerani Pantjastuti, 2008, *komite sekolah*, Yogyakarta: Hikayat Publishing.

- Sugiyono, 2016, *metodelogi penelitian kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta. Sukirno, 2006, *pedoman kerja komite sekolah*, yogyakarta: Pustaka widyamata
- .Syafi'i, 2018, Waka Sarana Prasarana, evaluasi dan suvervisi MAN 1 Palembang, *Wawancara*, 11 Oktober.
- U.H. Saidah, 2016, *pengantar pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang dan peraturan pemerintah RI, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, (jakarta: dirjen pendidikan islam depagRI, 2006)